

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uni Eropa yang merupakan sebuah supranasional modern yang telah berdiri sejak tahun 1992 melalui traktat Uni Eropa di kota Maastricht, Belanda dan disahkan tahun 1993 untuk mengubah *European Communities* (EC) menjadi *European Union* (EU) yang bertujuan untuk selain menghentikan konflik bersenjata di Eropa juga untuk menciptakan Eropa yang damai dan makmur dalam ruang ekonomi bersama dan pasar Eropa yang membentuk dan mendorong upaya – upaya seperti integrasi, modernisasi, demokratisasi, dan globalisasi bagi negara – bangsa Eropa yang telah lepas dari belenggu perang dingin (1947 – 1991) (*European Union, The History of the European Union*, pp 1). Uni Eropa pula terbentuk atas nilai – nilai dan fondasi demokrasi yang menjunjung hak dan kebebasan manusia yang juga termasuk imigrasi yang bebas atas dasar kesepakatan *Schengen* yang telah ditandatangani pada tahun 1985, yang serta menghasilkan kebijakan open – border atau menghilangkan tapal batas negara yang membuka dan menghubungkan seluruh wilayah kawasan regional Eropa, yakni supranasional Uni Eropa itu sendiri yang berlaku pada seluruh negara – negara anggota dan non – anggota yang masuk di dalam daftar wilayah *Schengen* hingga pada masa sekarang (*Schengen Visa Info, Schengen Agreement*, pp 1).

Pada pertengahan dekade 2010an, Uni Eropa menghadapi tantangan baru yang akan mengubah wajah dan dinamika supranasional Eropa tersebut, yakni krisis imigran yang terjadi seiring meningkatnya konflik – konflik bersenjata dan persekusi agama dan etnis seiring dengan dampak dari revolusi *Arab Spring* yang terjadi hampir di seluruh wilayah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, konflik bersenjata lainnya di benua Afrika, serta intervensi militer dan politik Rusia di Ukraina yang tengah menghadapi perang sipil yang sudah terjadi sejak tahun 2014. Uni Eropa yang tidak mengalami konflik bersenjata menjadi tujuan utama

bagi para pengungsi atau imigran dari zona konflik yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, selain itu Uni Eropa melihat situasi krisis tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk mendorong promosi integrasi multikulturalisme dan penambahan kesempatan bekerja di Eropa untuk mengisi sektor ekonomi dan edukasi (*Council of the European Union, Council Conclusion on the integration of third country nationals legally residing in the EU* (2016), pp 1 – 8).

Selain mendorong promosi integrasi multikulturalisme dan penambahan potensi tenaga kerja di Eropa, pada tanggal 13 Mei 2015, Komisi Eropa juga mengusulkan untuk melaksanakan misi kemanusiaan dalam menyelamatkan para pencari suaka atau imigran yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang berusaha menyebrangi laut Mediterrania untuk mencapai kontinen Eropa sebagai destinasi tujuan akhir dalam mencari suaka atau mencari perlindungan dan pekerjaan maupun kesempatan lainnya. Serta di waktu yang sama, Komisi Eropa juga mengencangkan kapabilitas dan kapasitas penguatan keamanan di laut Mediterrania sebagai perbatasan eksternal Uni Eropa yang dimana Italia, Yunani, Malta, Turki, dan Spanyol yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan perbatasan eksternal Uni Eropa di wilayah laut Mediterrania dan bekerja sama dengan Agensi penjaga pantai dan perbatasan Eropa (Frontex) dan Common Security and Defense Policy (CSDP) untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan keamanan perbatasan eksternal tersebut (*European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; A European Agenda on Migration* (2015), pp 3 – 5).

Masuknya jumlah pencari suaka atau imigran yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika ke wilayah Uni Eropa sejak tahun 2015 sudah mencapai 1.26 juta orang dan bertambah hingga berjumlah 2.5 juta orang pada tahun 2016 yang telah melakukan apply atau aplikasi sebagai pengungsi di Uni Eropa, belum termasuk dengan para pencari suaka atau imigran yang dikategorikan ilegal yang berjumlah 2.3 juta orang pada

tahun 2015 dan 2016, jumlah pencari suaka atau imigran yang masuk ke dalam Eropa baik negara anggota dan non – anggota Uni Eropa mengalami penurunan yang dikarenakan oleh kekurangan budget untuk menanggung kehidupan dan pembiayaan penanggulangan pengungsi di Eropa sehingga pada tahun 2016 sekitar 494.000 pengungsi dipulangkan ke negara asalnya (*European Parliament, News; EU migrant crisis: facts and figures (June 30, 2017)*, pp 1).

Dari situasi masuknya para pencari suaka atau imigran dalam jumlah yang massif dan menjadi sulit dikendalikan ke dalam benua Eropa tersebut dan tidak sesuai dengan harapan dari agenda migrasi tahun 2015, Uni Eropa mendefinisikan fenomena tersebut menjadi sebuah bentuk krisis baru, yakni krisis imigran atau krisis pengungsi Suriah yang juga bercampur dengan para pencari suaka yang mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah dan Afrika yang bermula terjadi secara signifikan di laut Mediterrania dengan para pendatang tersebut yang menyeberang untuk mencapai benua Eropa yang berdampak langsung terhadap supranasional Uni Eropa (*European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; A European Agenda on Migration (2015)*, pp 5 – 6, 8).

Dinamika struktural dan fenomenal yang sedang terjadi di Uni Eropa pada dekade 2010an ini menjadi sebuah hal yang baru dan kontroversial bagi dunia yang dimana penguatan politik identitas menjadi signifikan terutama pada hampir seluruh dari negara – negara anggota dari organisasi supranasional dan regional Uni Eropa yang disebabkan oleh beberapa faktor yang vital yang mengakibatkan mengapa konsep politik identitas di Eropa semakin menguat seperti munculnya pemikiran Euroskeptis dalam tubuh masyarakat dan struktur organisasi Uni Eropa.

Proses dari proyek globalisme dan multikulturalisme atau agenda migrasi yang dilaksanakan secara massif di hampir seluruh negara – negara anggota Uni Eropa oleh pemerintahan supranasional Uni Eropa,

political – correctness yang membatasi dan mengurangi nilai – nilai nasionalisme dan sejarah kelam Eropa, dan yang sangat mendominasi dari pada signifikansi tersebut adalah kebijakan penanggulangan krisis imigran di Uni Eropa yang mulai memuncak pada tahun 2015 yang mendorong masuknya imigran – pengungsi dalam jumlah yang besar ke dalam negara – negara anggota dan bersifat memaksa dengan ancaman sanksi ekonomi terhadap negara anggota yang tidak ingin menerima implementasi kebijakan tersebut seperti pada negara – negara anggota yang berlokasi di wilayah Eropa Timur dan Tengah yang masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan politik identitasnya yang menguat pada dalam tubuh pemerintahan dan masyarakatnya sendiri (*Nationalism in Heart of Europe needles EU, BBC News, 23 Februari 2018*).

Respon dari negara – negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan Uni Eropa terkait krisis imigran tahun 2015 pula dimuat oleh isu – isu non – tradisional seperti *human security* yang terjadi dan berdampak pada hampir ke seluruh masyarakat lokal Eropa terutama pada wanita dan anak – anak, seperti maraknya kasus seperti pemerkosaan oleh para pencari suaka atau imigran asal Timur Tengah dan Afrika terhadap wanita – wanita muda lokal Eropa beserta diikuti dengan berbagai macam kasus – kasus kriminal lainnya seperti penculikan, pembunuhan, perampokan, hingga pada aksi terorisme yang dilakukan oleh para sel – sel jaringan teroris yang bersembunyi diantara para pencari suaka atau imigran hasil dari kebijakan – kebijakan penanggulangan krisis imigran dan relokasi imigran dari Uni Eropa tersebut (*Atkinson J., Migrant Crime Wave: The EU Cover – Up Revealed (2018), pp 32 – 36, 47, 75*).

Dengan bertambah banyaknya jumlah populasi imigran atau pencari suaka dari luar kawasan wilayah Eropa yang telah masuk ke dalam hampir di seluruh wilayah Uni Eropa juga telah mengakibatkan muncul nya sikap dan rasa sentiment yang bersifat nasionalis dan radikal yang menganggap bahwa para masyarakat asing ini sedang menginvasi Eropa dan musuh bagi bangsa Eropa yang berusaha untuk menggantikan bangsa Eropa asli di atas tanahnya sendiri yang juga menjadikan hal – hal tersebut lahir

sebagai bibit penguatan politik identitas nasional Eropa yang sedang mengalami signifikansi sejak tahun 2015 hingga pada tahun 2017 dan pada masa sekarang, 2018 seperti apa yang telah disampaikan dari pidato perdana menteri Hungaria, Viktor Orban dan reaksi masyarakatnya mengenai isu krisis imigran tersebut (*Hungarian leader says Europe is now 'under invasion' by migrants, The Guardian, 15 Maret 2018*).

Polandia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa juga dimintai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menerima sekitar kurang lebih 7,000 imigran dari 160,000 alokasi imigran dari Uni Eropa sesuai dengan kuota yang telah disepakati oleh perdana menteri Ewa Kopacz pada bulan September, 2015 (*Diminishing Solidarity: Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis, Migration Policy Institute, 16 Juni 2016*). Kesepakatan tersebut pula menuai kritik dan protes baik dari ruang lingkup koalisi Visegrad dan masyarakat Polandia sendiri yang terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan perdana menteri Beata Szydło bersama partai nasionalis sayap kanan yang mendominasi akibat dari suara kritik dan protes anti – imigran yang terjadi hampir di seluruh Polandia (*Diminishing Solidarity: Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis, Migration Policy Institute, 16 Juni 2016*).

Aksi penolakan dan gerakan resistensi yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat Polandia sebagai respon terhadap kuota alokasi imigran dari Uni Eropa terkait krisis imigran yang meledak sejak tahun 2015 yang telah menciptakan dilemma dan efek bagi Uni Eropa tersebut sudah dimulai sejak naiknya Andrzej Duda sebagai presiden ke – 6 Polandia pada tanggal 6 Agustus tahun 2015, seorang politisi independen yang nasionalis dan religius Katolik yang menolak proposal kuota alokasi dan relokasi imigran dari hasil rancangan kebijakan Uni Eropa tersebut untuk diimplementasikan dan dipaksa terhadap Polandia untuk mengikutinya (*Poland's Duda Blast EU 'Dictate of the Strong' on Migrants, Bloomberg, 8 September 2015*). Hal tersebut pun juga diikuti oleh aksi dari pada gerakan reaksioner nasionalis populis di Polandia

yang menginginkan negara Polandia sebagai domain negara Kristen Katolik yang berdaulat dan bersih dari krisis imigran beserta ancaman terorisme yang berpotensi di dalamnya.

Dengan timbulnya fenomena krisis tersebut yang terjadi di Uni Eropa, kementerian luar negeri Polandia mendefinisikan krisis imigran tersebut sebagai sebuah permasalahan Timur dan Selatan yang berasal dari berbagai situasi krisis perang sipil di Ukraina, krisis perang di Suriah, serta krisis ekonomi dan politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika yang berefek langsung ke Uni Eropa dan juga Polandia (*Waszczykowski W. (2016), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach Polskiej Polityki Zagranicznej w 2016 r., 29 stycznia 2016 r., pp 10, 12).*

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana respon kebijakan luar negeri negara Polandia dalam menghadapi resolusi kebijakan relokasi imigran dan suaka dari Parlemen Uni Eropa terkait krisis imigran di Mediterrania periode 2015 – 2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya Polandia dalam merespon kebijakan krisis migran 2015 oleh Uni Eropa.
2. Menganalisis dan menjelaskan mengenai perkembangan politik identitas di Polandia sebagai bagian dari konsep kebijakan luar negeri nya sejak dikeluarkannya kebijakan krisis migran oleh Uni Eropa pada tahun 2015 hingga 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Setidaknya ada dua manfaat yang dapat berguna bagi pembaca penelitian ini:

1. Secara akademis, penelitian ini berfungsi untuk mengkaji relasi Polandia dengan Uni Eropa dalam isu krisis migran yang merupakan bibit dari lahirnya kekuatan politik identitas di negara Polandia sebagai konsep kebijakan luar negeri yang agresif terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut beserta kontribusinya dalam studi HI di kawasan regional Eropa kontemporer.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi setiap akademika lain dalam pembahasan politik identitas di Polandia sebagai konsep kebijakan luar negeri nya dalam isu krisis migran di Uni Eropa.

